

RAKER KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM DENGAN KOMISI VI DPR

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6). Raker tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023 dan realisasi anggaran semester I tahun 2024.



FOTO: ANT

DJBC Kemenkeu Paparkan Sejumlah Kebijakan dan Program Kerja 2025

“Kami sampaikan untuk (kebijakan) bea dan cukai pada 2025 yakni pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, perlindungan kepada masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, penerimaan negara yang optimal, serta birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien,” kata Askolani.

JAKARTA (IM) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) memaparkan sejumlah kebijakan pada 2025, termasuk pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, salah satunya dengan mengoptimalkan kawasan khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan ekonomi. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang diikuti secara daring dari Jakarta, Selasa (11/6), Dirjen Bea dan

Cukai Kemenkeu Askolani menyampaikan bahwa kebijakan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan juga diupayakan dengan penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal kepabeanan dan cukai. Dikutip dari Antara, pihaknya juga berencana memberikan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan TKDN, pemberian fasilitas fiskal untuk pengembangan

IKN, daerah mitra, ekonomi hijau, dan hilirisasi industri, serta meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi dan kerja sama kepabeanan internasional. Ia menyatakan bahwa tidak hanya kebijakan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, DJBC Kemenkeu juga memiliki tiga kebijakan lainnya. “Kami sampaikan untuk (kebijakan) bea dan cukai pada 2025 yakni pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, perlindungan kepada masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, penerimaan negara yang optimal, serta birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien,” kata Askolani. Terkait kebijakan perlindungan kepada masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kon-

tributif, ia menuturkan bahwa pihaknya akan memperkuat pengawasan barang, mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik, serta mengembangkan pelayanan dan pengawasan perbatasan. Sementara itu, untuk mewujudkan kebijakan penerimaan negara yang optimal, DJBC Kemenkeu berupaya untuk melakukan intensifikasi cukai, ekstensifikasi barang kena cukai baru, menyederhanakan proses bisnis cukai, menguatkan pelayanan, pemeriksaan, dan pengawasan, serta mengembangkan sistem klasifikasi barang yang adaptif. Kemudian, kebijakan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien berusaha dicapai dengan mendorong reformasi kepabeanan dan cukai yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan well-being pegawai, mengembangkan organisasi yang mod-

ern, dinamis, dan lincah, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset. Dalam kesempatan tersebut, Askolani juga menyampaikan pagu indikatif DJBC Kemenkeu TA 2025 adalah sejumlah Rp3.518.950.907.000, yang dibagi sebesar 73,16 persen (Rp2,574 triliun) untuk program dukungan manajemen, 26,36 persen (Rp927,629 miliar) untuk program penerimaan negara, dan 0,48 persen (Rp16,913 miliar) untuk program kebijakan fiskal. “Kami menjalankan tiga program utama dari lima program di Kemenkeu, yaitu kebijakan fiskal, pengelolaan penerima negara, dan dukungan manajemen dengan pagu yang diberikan pada 2025 sebanyak Rp3,518 triliun,” ujarnya. ● **hen**

RI-Nigeria Bahas Potensi Peningkatan Perdagangan

JAKARTA (IM) - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Nigeria Doris Uzoka-Anite. Pertemuan dilakukan di sela-sela pertemuan para menteri perdagangan dan investasi negara OKI di Turki. Sejumlah isu penting mengenai perdagangan kedua negara dibahas di antaranya perkembangan pertumbuhan ekonomi hingga potensi penguatan kerjasama perdagangan antar kedua negara. Jika dilihat angka tren perdagangan antar kedua negara sepanjang lima tahun terakhir (2019-2023) cenderung menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun belum maksimal. Secara angka perdagangan kedua negara tersebut mengalami pertumbuhan 30% dengan nilai total perdagangan mencapai USD4,4 miliar. “Pertumbuhan perdagangan bilateral meningkat 30% namun masih dapat ditingkatkan karena Nigeria adalah negara terbesar di kawasan dengan sumber daya alam yang kaya,” kata Zulhas dalam pertemuan bilateral di Turki, Selasa (11/6). Oleh karena itu, Zulhas mengatakan bahwa hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Nigeria bisa terus ditingkatkan. Langkah ini dinilai penting agar kedua negara bisa merasakan keuntungan yang sama. Apalagi presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi 7-8%.

dengan baik kerja sama ini dapat ditingkatkan,” tuturnya. “Indonesia dan Nigeria merupakan kekuatan ekonomi utama di kawasan masing-masing, Nigeria sebagai kekuatan ekonomi di benua Afrika, Indonesia sebagai ekonomi utama di Asia Tenggara,” sambungnya. Dia menyebutkan pertemuan tersebut juga mendorong agar perjanjian kerja sama antar kedua negara tersebut terus ditingkatkan. Sebab Indonesia memiliki sejumlah komoditas potensial untuk diekspor. “Banyaknya potensi ekspor Indonesia yang diperlukan oleh Nigeria seperti minyak kelapa sawit, suku cadang kendaraan bermotor, produk kayu dan produk kecantikan / kosmetik. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan produk Nigeria seperti biji coklat, produk pertanian, emas, dan produk logam seperti aluminium,” jelasnya. Zulhas juga mengabarkan bahwa pertemuan tersebut disambut positif pemerintah Nigeria. Apalagi banyak perusahaan Indonesia yang saat ini telah menaamkan investasinya di Nigeria. “Nigeria menyambut baik pertemuan ini. Indofood dan Kalbe Farma sudah hadir di Nigeria. Indofood salah satu eksportir terbesar Nigeria dan KADIN juga sangat aktif promosi perusahaan Indonesia di Nigeria. Jumlah penduduk Nigeria yang mencapai 250 juta jiwa mirip dengan Indonesia memiliki potensi bagi ekspor kendaraan bermotor Indonesia. Nigeria punya beberapa produk yang bisa diekspor,” ungkapnya. Terakhir, melihat potensi yang besar dari Nigeria yang kaya sumber daya alam, dan siap mengundang investor dari Indonesia, maka Zulhas akan mengajak KADIN dan pengusaha Indonesia untuk melakukan misi dagangan dan *business matching* di Nigeria. ● **dot**

Insentif Baru ESDM Diklaim Dapat Tingkatkan Produksi Migas

SURABAYA (IM) - PT Pertamina EP menilai, insentif dari kebijakan baru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas). “Insentif itu terutama akan menarik orang, khususnya dari kontraktor, untuk investasi atau menambah jumlah pegeborannya untuk meningkatkan produksinya,” ujar VP SCM Regional Jawa PT Pertamina EP Bayu Kusuma Tri Aryanto di Surabaya, Jawa Timur, seperti dikutip dari Antara, Selasa (11/6). Dari sisi perencanaan strategis maupun tim operasional, kata Bayu, harus mempersiapkan bagaimana cara mendukung percepatan pengeboran. Dukungan tersebut meliputi kesiapan pengeborannya dan kesiapan fasilitas produksi lainnya. “Yang perlu kami (supply chain management/SCM) antisipasi adalah apa saja upaya untuk mengakselerasinya,” kata Bayu.

Dia pun berharap melalui Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2024 (IOG SCM Summit 2024), dapat terjadi pertukaran pendapat dan pengalaman praktik terkait akselerasi tersebut. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menyebutkan sektor hulu minyak dan gas bumi bakal lebih bergairah dengan insentif dan kebijakan baru yang dikeluarkan. Pertama, kebijakan perbaikan ketentuan lelang dan kontrak blok migas. “Ini mencakup antara lain split kontraktor bisa mencapai 50 persen, signature bonus minimum, lelang penawaran langsung blok migas tanpa joint study, bank garansi lebih murah, dan jenis kontrak bisa gross split maupun cost recovery,” ujar Ariana. Kebijakan kedua adalah privilege eksplorasi, antara lain kontraktor dapat memin-dahkan komitmen kegiatan eksplorasi ke wilayah terbuka

di luar blok yang dikerjakan. “Selain itu, perpanjangan jangka waktu eksplorasi menjadi 10 tahun dan ada tambahan waktu eksplorasi lebih dari 10 tahun. Jika kebijakan ini tidak ada, maka discovery gas North Galal, mungkin tidak terjadi,” jelas Ariana Soemanto. Ketiga adalah kebijakan insentif hulu migas melalui Kepmen ESDM Nomor 199 Tahun 2021. Kebijakan tersebut adalah untuk memperbaiki keekonomian kontraktor di tengah jalan, melalui perbaikan split kontraktor, investment credit, perhitungan depresiasi dipercepat, dan perbaikan parameter, yang memengaruhi keekonomian lainnya. Ariana menambahkan untuk kebijakan atau insentif yang sedang difinalisasi yaitu kebijakan kontrak bagi hasil gross split baru melalui peraturan Menteri ESDM. ● **hen**



FOTO: ANT

PERESMIAN RICE MILLING AB2TI

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) didampingi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (tengah) melihat beras hasil penggilingan usai peresmian Rice milling milik Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di desa Kalensari, Widarsari, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (11/6). Menkop berharap penggilingan padi tersebut bisa memberikan kesejahteraan bagi petani setempat.

LMAN Habiskan Rp2,41 T untuk Bebaskan Lahan IKN

JAKARTA (IM) - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan telah menggelontorkan Rp2,415 triliun untuk pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Realisasi itu merupakan akumulasi sejak dimulainya penyaluran pada pertengahan 2023 sampai 31 Mei 2024. Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan di IKN mencapai Rp3,949 triliun. Artinya masih terdapat sisa anggaran Rp1,534 triliun. “Terkait IKN baru kita mulai penyalurannya pertengahan 2023. Dari alokasi Rp3,9 triliun, sudah terealisasi Rp2,4 triliun,” kata Basuki dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (11/6). Anggaran tersebut untuk mendanai pengadaan lahan 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) di IKN. Khusus 2024

dari Januari-Mei, realisasinya mencapai Rp988,461 miliar. Total alokasi anggaran pembebasan lahan PSN yang dibiayai LMAN dari 2016 mencapai Rp159,890 triliun. Sampai saat ini yang sudah direalisasikan untuk pembayaran ganti rugi mencapai Rp130,008 triliun. Rinciannya terbesar untuk sektor jalan tol, di mana dari alokasi Rp131,816 triliun sudah terealisasi Rp108,663 triliun. Disusul sektor bendungan dengan realisasi Rp14,013 triliun dari alokasi Rp16,260 triliun. “Kemudian irigasi dari Rp831 miliar sudah tersalur Rp636 miliar, air baku Rp242 miliar sudah tersalur Rp100 miliar, jalur kereta api dari Rp5 triliun sudah tersalur Rp3,2 triliun, pelabuhan Patimban tersalur Rp800 miliar, kemudian Mandalika kita dimintakan sebagian kecil untuk membebaskan dengan anggaran Rp85 miliar dan sudah tersalur sepenuhnya,” kata Basuki. ● **dro**

Bappenas dan Pertamina Dukung Kebijakan Energi Keberlanjutan

JAKARTA (IM) - PT Pertamina (Persero) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama mendukung pengembangan kebijakan energi berkelanjutan. Adapun penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharno Monoarfa dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, di Gedung Bappenas, Jakarta pada Senin (10/6). Suharno menegaskan sinergi bersama Pertamina ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi krisis iklim global. Dia meyakini, kerja sama yang terjalin mampu mengakselerasi transisi energi, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini dilakukan untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.

iatan ESG (Environment, Social, Governance) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), diseminasi kebijakan dan pertukaran informasi terkait sektor energi untuk mendukung transformasi Indonesia. Guna meningkatkan efisiensi dan inovasi berkelanjutan, kerja sama juga melingkupi pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang energi. “Jadi beberapa tujuan sesuai dengan SDGs nya harus kita capai. Tadi telah ditandatangani PKS untuk mengembangkan SDM-SDM yang unggul untuk menjalankan semua bisnis kedepan yang lebih sustainable dan bisa menghasilkan ekonomi hijau. Transisi energi bagi Indonesia bukan hanya sekedar mengurangi karbon emisi, namun harus mampu meningkatkan PDB dan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja,” jelas Nicke.

“Kami punya kolaborasi dengan praktik baik di lapangan yang dilaksanakan oleh Pertamina. Kita ingin juga menurunkan emisi gas rumah dan mencapai net zero emission. Tapi di saat yang sama kita juga memerlukan energi kebutuhan net zero emission. Tapi di saat yang sama kita juga memerlukan energi kebutuhan net zero emission yang naik 4-5 kali lipat dengan energi yang environmental friendly. Pada saat yang sama juga mendorong industri petrochemical yang kompleks di Indonesia oleh karena itu kami berharap kerja sama ini benar-benar dapat digulirkan terus sampai kita menjemput indonesia emas 2045,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/6). Sementara itu, Nicke Widyawati menyatakan kerja sama ini menjadi bukti keseriusan Pertamina untuk mencapai kemandirian energi nasional, termasuk pemanfaatan energi rendah karbon sekaligus menyelaraskan dengan langkah pemerintah. “Pertamina sebagai badan usaha harus menyelaraskan langkah dengan Pemerintah mengingat peran utama dalam menjaga keamanan energi, keterjangkauan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Sekaligus terus mendorong program penurunan karbon emisi,” tegas Nicke. Dia menjelaskan sinergi antara Bappenas dan Pertamina mencakup kajian bersama dan pengembangan roadmap kebijakan energi atas ketahanan energi nasional, hilirisasi minyak dan gas bumi, dan pemanfaatan energi transisi. Selain itu, pelaksanaan keg-

Di sisi lain, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan kolaborasi antara Bappenas dan Pertamina akan menjadi bagian dari pemanfaatan Nusantara Sustainability Hub di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pada pekan lalu telah dimulai pembangunannya dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Nusantara Sustainability Hub akan menjadi pusat inovasi yang mendukung pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan. Adapun kehadirannya didukung oleh Pertamina Sustainability Expert sebagai brainware, berupa kumpulan ahli dari Pertamina dan perguruan tinggi termasuk Universitas Pertamina dalam bidang keberlanjutan. “Kerja sama Pertamina dan Bappenas diharapkan akan makin memperkuat Nusantara Sustainability Hub menjadi katalisator dalam prinsip ESG dan SDGs,” jelas Fadjar. ● **pan**

PENGUMUMAN
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SOLUSI INTERGRASI MANDIRI, tertanggal 06 Juni 2024, Nomor 17, yang dibuat dihadapan Dr. UDIN MARSUDIN, SH, M.Hum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, para pemegang saham PT. SOLUSI INTERGRASI MANDIRI, bekeududukan di Jakarta Utara ("Perseroan") dengan suara bulat telah memutuskan MEMBUKARKAN Perseroan serta menunjuk Direksi Perseroan sebagai Likuidator Perseroan.
Para Pihak yang keberatan mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Likuidator Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, di alamat : Jl. Pluit Karang Sari VII N. 18, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
Jakarta, 12 Juni 2024
LIKUIDATOR PERSEROAN

mandiri
PEMBERITAHUAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kepada Yth,
PT. Pitmas Jaya
Di tempat

U.P. : - Sdr. Azhari Navarino (Direktur Utama)
- Sdr. Join Virgo (Direktur)

Menunjuk Perjanjian Pengalihan Piutang Bank (Cessie) telah dilakukan dengan Akta Notaris Prima Hedy, SH, Min No. 03 tanggal 04 Juni 2024 dan No. 06 tanggal 04 Juni 2024 serta Perjanjian Kredit. PT. Bank Dagang Negara (Persero) Cabang Jakarta Kota yang saat ini menjadi PT Bank Mandiri (Persero), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai catatan administrasi kami, jumlah kewajiban kredit PT. Pitmas Jaya dengan nomor rekening 115010012687 dan 115010012688 per tanggal 04 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 604.946.458,30 (terbilang enam ratus empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh sen).
- Sebagai upaya penyelesaian fasilitas kredit PT. Pitmas Jaya maka pada tanggal 04 Juni 2024, kami telah melaksanakan pengalihan piutang (Cessie) atas fasilitas kredit PT. Pitmas Jaya berikut dokumen yang berhubungan dengan fasilitas kredit PT. Pitmas Jaya kepada kreditur baru sbb:

- Nama : Raharja Mukti
- Alamat : Jln. Raya KLP Kopyor O.I/17, RT.01/RW.002, Kel.Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dengan telah berahlinya piutang tersebut maka setiap dan / atau seluruh piutang atau tagihan kredit PT. Pitmas Jaya menjadi hak dan milik dari kreditur baru tersebut.